

SOAL RANWAL RPJMD KABUPATEN DEMAK 2025-2029 DPRD Usulkan Ketahanan Pangan dan Penanganan Banjir Rob Masuk Isu Strategis



VARIA LEGISLATIF

DEMAK (KR)– Setelah melalui pembahasan oleh komisi-komisi DPRD Kabupaten Demak, Rancangan Awal (ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2025-2029 disepakati, Senin (05/05/2025). Namun demikian ada beberapa hal menjadi perhatian para wakil rakyat. Antara lain terkait ketahanan pangan dan penanganan banjir dan rob di kawasan pesisir Demak, yang diusulkan masuk isu strategis.

agenda 'Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak Terhadap Ranwal RPJMD 2025-2029', Ketua DPRD Demak H Zayinul Fata SE menuturkan, rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Demak belum selaras dengan identifikasi permasalahan serta isu yang bersumber dari KLHS nasional dan regional. Sebab menurutnya, permasalahan ekonomi tidak semata pada rendahnya pendapatan masyarakat.

"Namun dalam pembangunan ekonomi isu terbesar adalah daya saing ekonomi melalui investasi, peningkatan produktivitas sektor unggulan, di samping ekonomi hijau. Sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat," ungkapnya, didampingi Wakil DPRD Demak dari Fraksi Partai Gerindra H Maskuri SAg.

Selain itu, permasalahan lingkungan tidak hanya pada masalah sampah, limbah dan banjir. Namun permasalahan lingkungan di Kabupaten Demak adalah kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh tata guna lahan, polusi air, dan udara, serta perubahan iklim.



Ketua DPRD Kabupaten Demak H Zayinul Fata didampingi Wakil Ketua DPRD Demak dari Fraksi Partai Gerindra H Maskuri saat menandatangani nota kesepakatan Ranwal RPJMD 2025-2029, disaksikan Bupati dr H Eisti'annah dan Wabup KH Muhammad Badruddin.

Oleh karena itu, politisi PKB itu berpendapat, peningkatan perekonomian daerah dan ketahanan pangan dalam menunjang pembangunan yang inklusif hendaknya masuk isu strategis.

Terlebih sudah sejak lama Kabupaten Demak menjadi penyanga lumbung pangan nasional.

"Maka sudah seharusnya ketahanan pangan masuk dalam isu strategis

pembangunan daerah, dan mendapatkan support penuh sehingga terus meningkat produktivitasnya," tuturnya.

Begitupun penanganan banjir rob, diusulkan agar dimasukkan pula daftar isu strategis pembangunan. Mengingat dampaknya yang luas dan kompleks bagi kehidupan sosial dan ekonomi warga pesisir Demak khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

"Bahkan jika banjir rob di Demak tidak ditangani secara serius dan komprehensif, sebagian kawasan Demak berpotensi hilang dari peta. Imbas genangan air pasang laut berkepanjangan, serta kikisan abrasi yang kian hari kian tak terhentikan pada infrastruktur kawasan pesisir," terang Maskuri, yang tinggal di kawasan Sayung, salah satu kecamatan terendam rob berkepanjangan.

Sehubungan itu, Bupati Demak dr H Eisti'annah SE yang hadir didampingi Wabup KH Muhammad Badruddin MPd menyampaikan, apresiasi atas dukungan dan kerjasama serta sinergitas yang terjalin antara Pemkab dan DPRD Demak. Saran dan masukan terkait ranwal RPJMD Kabupaten Demak 2025-2029 langsung diperhatikan, dan segera ditindaklanjuti. (Ssj)

PERKUAT PERLINDUNGAN JURNALIS

Dewan Pers-LPSK Tanda Tangan MoU

JAKARTA (KR) - Dewan Pers memperkuat komitmen perlindungan terhadap jurnalis dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). MoU ini terkait dengan perlindungan kerja pers sebagai saksi dan atau korban tindak pidana. Penandatanganan berlangsung di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat, Senin (5/5).

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan apresiasinya atas terwujudnya kerja sama tersebut. Ninik Rahayu mengatakan, MoU ini sebagai langkah penting yang lebih maju, mengingat perjanjian sebelumnya telah berakhir sejak September 2024. "Memang sempat ada keterlambatan, tetapi kami bersyukur di akhir masa jabatan periode 2022-2025, kerja

sama ini bisa disegerakan," ucap Ninik. Menurutnya, masih ada sejumlah perjanjian kerja sama (PKS) lanjutan yang ingin difinalisasi, bahkan dengan penambahan mitra dari lembaga-lembaga yang selama ini sudah terjalin baik. Ninik Rahayu menyebutkan, lembaga pers terdiri dua entitas, yaitu media dan jurnalis, yang keduanya rentan mengalami berbagai bentuk ke-

kerasan dalam menjalankan profesinya.

Ia menegaskan, jurnalis merupakan pembela hak konstitusional warga negara atas informasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, lanjutnya, insan pers memerlukan dukungan penuh, baik dalam mencari, mengolah, menyimpan, memproduksi maupun menyebarkan informasi.

"Terlebih saat ini bentuk kekerasan yang mereka hadapi makin beragam seiring dengan munculnya media digital, media sosial, hingga teknologi baru seperti AI," ujarnya.

Ninik menyorotia banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tidak ditangani dengan tuntas. (Ant/Obi)-d

Indeks Menabung Konsumen Menguat

JAKARTA (KR) - Indeks Menabung Konsumen (IMK) pada bulan April 2025 berada di level 83,4, menguat 5,1 poin dari posisi bulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan komponen Indeks Waktu Menabung (IWM) sebesar 7,6 poin pada periode yang sama ke level 94,6 dan Indeks Intensitas Menabung (IIM) yang tumbuh 2,7 poin ke level 72,2. Sementara terkait komponen IIM, sebanyak 29,3 persen responden Survei Konsumen dan Perekonomian (SKP) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan tidak pernah menabung.

"Angka ini lebih rendah dari 31,9 persen responden yang tidak pernah menabung pada bulan Maret 2025. Selain itu, terjadi penurunan pada persentase responden yang menilai bahwa nilai yang ditabung lebih kecil dari yang direncanakan, yaitu dari 53,7 persen responden pada Maret 2025 menjadi 49,1 persen responden pada April 2025," ungkap Sekretaris Lembaga Penjamin

Simpanan Jimmy Ardianto di Jakarta, Senin (5/5).

Mengenai komponen IWM, Jimmy Ardianto mengatakan, persentase responden yang menilai saat ini waktu tepat untuk menabung meningkat menjadi 27,9 persen pada April 2025, dari 24,8 persen pada Maret 2025. Sejalan dengan hal tersebut, persentase responden yang menyatakan tiga bulan mendatang merupakan waktu tepat untuk menabung meningkat, menjadi 42,3 persen dari 38,9 persen pada periode yang sama. Perkembangan ini mengindikasikan rencana dan intensitas menabung konsumen yang kembali normal pasca-Hari Raya Idul Fitri.

Sedangkan pergerakan IMK pada sebagian kelompok pendapatan rumah tangga (RT) cenderung menguat pada April 2025. Menurut Jimmy, peningkatan terbesar IMK terlihat pada kelompok RT berpendapatan di atas Rp 1,5 juta-Rp 3 juta/bulan. (San)-d



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN



DPRD Klaten Setujui Rancangan Awal RPJMD 2025 - 2029

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten menyetujui Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal - RPJMD) Tahun 2025-2029. Persetujuan itu diberikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Klaten, Edy Sasongko, dan dihadiri Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, Senin (5/5/2025).

Ketua DPRD Klaten, Edy Sasongko mengemukakan, telah ada kesepakatan antara DPRD dan Bupati terkait Ranwal RPJMD 2025-2029. DPRD telah menyepakati terkait visi misi bupati, yakni maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Ada tiga tujuan dan 10 sasaran prioritas. Selain itu juga menyetujui timeline pembahasan, maksimal 6 bulan setelah bupati-wakil bupati dilantik. Raperda RPJMD harus sudah disetujui.

"Tadi sudah sepakat untuk pembahasan ke depan. Ini baru ranwal, besok awal Juni penyerahan Raperda RPJMD dari eksekutif ke DPRD, dan dibahas tidak boleh melebihi 20 Agustus 2025, karena tidak boleh melebihi 6 bulan setelah bupati-wakil bupati dilantik," kata Edy Sasongko.

Sepuluh program prioritas tersebut adalah, Dalam alus, padang dan banyu lancar ; Pupuk murah, mudah dan insentif untuk petani ; Modal usaha 15 juta setiap karpang taruna; Bela beli produk UMKM; Gratis berobat, pendidikan, dan sembako hanya dengan KTP; Internet gratis sampai ke desa; Lingkungan asri ; Satu desa satu fasilitas olahraga; Program insentif untuk guru, kader posyandu dan relawan; Pembangunan kreatif hub dan gedung kesenian.



Bupati dan pimpinan DPRD menunjukkan nota kesepahaman Ranwal RPJMD 2025 - 2029

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengemukakan RPJMD bukan sekedar dokumen, tetapi kesepakatan dan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif, terkait arah pembangunan Klaten 5 tahun ke depan.

"Konsep dari eksekutif, lalu disinkronkan dengan teman-teman dari legislatif dan ketemu di titik tengah. Kemudian akan kita bahas bersama, sehingga 5 tahun ke depan Klaten akan dibawa kemana, dibahas dalam RPJMD itu," kata Bupati.

Bupati menambahkan, pihaknya juga sudah menyinkronkan RPJMD dengan astacita dari Presiden, sekaligus disinkronkan dengan kepentingan yang ada di provinsi. Bupati berharap tabulasi yang berbentuk RPJMD nantinya benar-benar bisa membuat masyarakat di Kabupaten Klaten lebih maju,

sejahtera dan berkelanjutan. "Kebetulan siang ini juga ada Musrenbang di provinsi, saya juga akan sampaikan kalau di Kabupaten Klaten, persetujuan untuk ranwal RPJMD sudah selesai," jelas Bupati.

Bupati sudah menetapkan 10 skala prioritas program, dan untuk tahun pertama dan kedua fokus pada infrastruktur. Hal tersebut sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah ketika Musrenbangwil tingkat eks. Karesidenan Surakarta di Pedopo Pemkab Klaten beberapa waktu lalu.

"Insya Allah dua tahun ke depan fokusnya di infrastruktur, ada perbaikan jalan, penerangan jalan umum, dan juga berkaitan dengan irigasi. Namun demikian, program-program yang lain juga tetap dijalankan sesuai rencana sebelumnya, meskipun porsinya tidak sebesar infrastruktur," tambah Bupati.

Ketua DPRD maupun Bupati juga menanggapi isu-isu terkini, seperti sekolah rakyat. Untuk saat ini Kabupaten Klaten masih pada tahap mencari lahan yang mendekati ketentuan aturan. Pemkab Klaten kesulitan untuk mendapatkan lahan sesuai ketentuan, yakni seluas 5 hektar.

"Kalau boleh kurang 5 hektar, kami mengusulkan tanah Kepurun, ternyata Kepurun hanya sekitar 2 hektar lebih. Ini tadi diskusi dengan Pak Ketua DPRD, ada potensi lain yang kebetulan juga aset pemerintah pusat, luasnya sekitar 5 hektar, yaitu tanah bekas pabrik Gula Ceper," papar Hamenang maupun Edy Sasongko.

Bupati akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk sekolah rakyat.

Tulisan dan Foto : Sri Warsiti



Ketua DPRD dan Bupati saat rapat paripurna.



Anggota DPRD mengikuti jalannya rapat paripurna.



Anggota DPRD serius mengikuti rapat paripurna.